



BP3OKP

Laporan Bulanan

Badan Pengarah Papua

MEI 2025

Laporan Operasional & Kegiatan

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Provinsi Papua Barat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga, penyusunan Laporan Bulanan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan laporan operasional dan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Mei 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan, realisasi dan kinerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sorong, 10 Juni 2025

Anggota BP3OKP

Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,



Drs. Otto Ihatau, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Maksud & Tujuan	4
1.2 Ringkasan Kelembagaan	4
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	4
1.2.2 Definisi	5
1.2.3 Struktur Kelembagaan.....	5
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	5
1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	6
1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	7
BAB II KEGIATAN DAN CAPAIAN	8
2.1 Rekapitulasi Kegiatan	8
2.2 Capaian	68
BAB III PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud & Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai laporan rutin yang dilaporkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP), Kepala Sekretariat BPP Provinsi Jayapura (selaku koordinator Sekretariat BPP), serta Kepala Sekretariat BPP Sorong (KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya).

Tujuan dari disusunnya laporan ini antara lain :

- 1) Sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Mei 2025.
- 2) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya pada bulan Mei 2025.
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan/ atau program kerja, penyelenggaraan dan evaluasi kerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya untuk bulan yang akan datang.
- 4) Sebagai laporan operasional Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

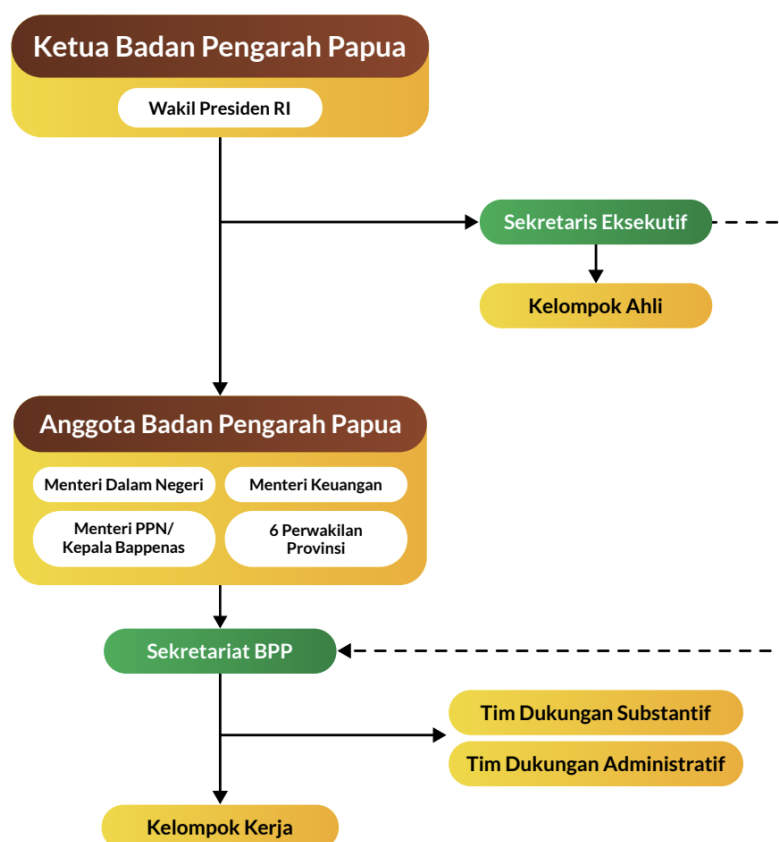
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 3) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
- Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

Ringkasan jumlah sumber daya manusia yang ada di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya antara lain :

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1	Pimpinan (Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya)	1
2	Kelompok Kerja	
	Papua Sehat	1
	Papua Cerdas	1
	Papua Produktif	1
	Papua Polhukam/Damai	1 (Nonaktif)
3	KPPN Sorong sebagai Tim Dukungan Administratif	5
4	Staf PPNPN	3
Jumlah		13

1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

No	Uraian	Jumlah (Unit/Set) / Keterangan
A	Bangunan	1 Unit (Milik GKN Sorong)
B	Ruangan	
	Front Office	1 Unit
	Ruang Rapat	1 Unit
	Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Istirahat Pimpinan/ Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Dapur	1 Unit
	Ruang Kamar Mandi/Toilet	2 Unit
C	Peralatan dan Perlengkapan	
	Meja Kerja	10 Unit
	Kursi Kerja	10 Unit
	Meja Rapat	1 Unit
	Kursi Rapat	9 Unit
	Meja Tamu	1 Unit
	Kursi Tamu	3 Unit
	AC	5 Unit
	Printer	2 Unit
	Laptop	7 Unit
	Sofa Tamu	1 Set
	Smart TV	3 Unit
	Meja dan Kursi Makan	1 Set
	Kulkas	1 Unit
	Kompor Listrik	1 Unit
	Dispenser	2 Unit
	Mesin Kopi	1 Unit
	Jam Dinding	3 Unit
	Kitchen Set	1 Set
	CCTV	4 Unit
	Lemari Arsip	1 Unit
	Lemari Kamar	1 Unit
	Tempat Tidur	1 Unit
	Rak Piring Kecil	2 Unit
	Starlink	1 Unit
	Hardisk	2 Unit
	ATK (Stapler, Gunting, Penggaris, dll)	Tersedia
	Peralatan Makan (Piring, Sendok, dll)	Tersedia

BAB II

KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

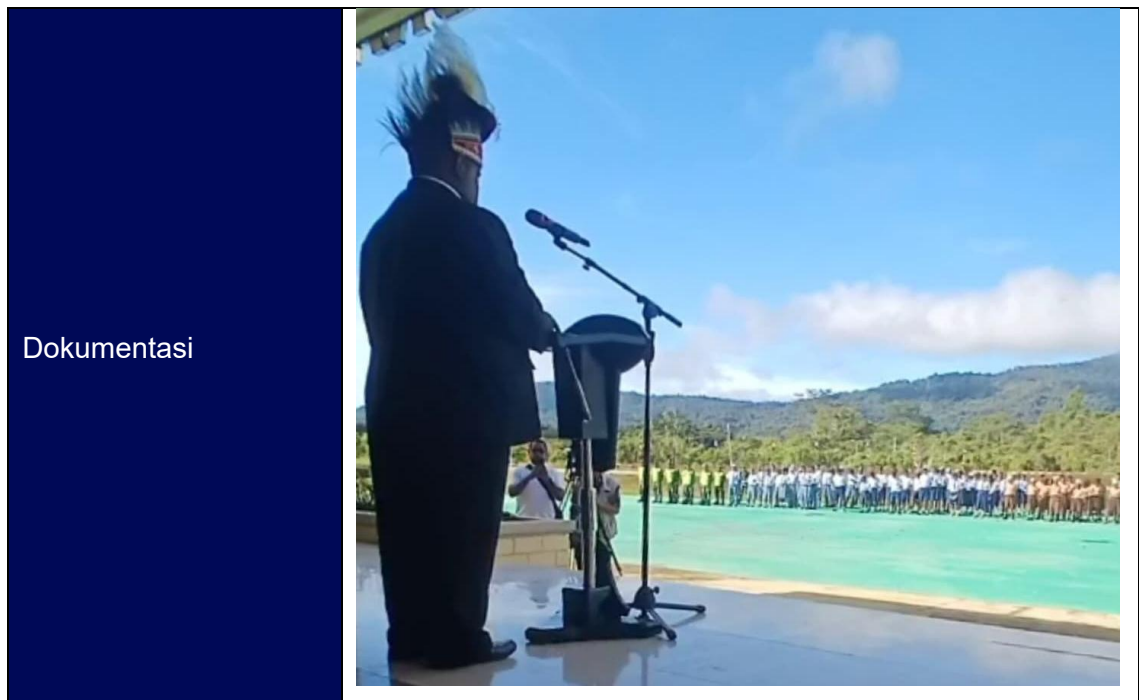
Rekapitulasi kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Mei tahun 2025, antara lain :

1) Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Pendampingan Pelaksanaan Program Percepatan Misi Cerdas terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	01-02 Mei 2025 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan fungsi koordinasi dan sosialisasi program percepatan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau serta Pemda Kabupaten Tambrau
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Tambrau
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	Hasil Koordinasi ini adalah bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau telah bersepakat untuk menerima dan mengalokasikan program SSH di Kabupaten Tambrau, yang kedua bahwa Pertemuan bersama Bupati Tambrau disiapkan pada tanggal 2 Mei 2025 setelah Upacara Hardiknas
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Koordinasi bersama Dinas untuk mempersiapkan tahapan awal, yakni Survey
Dokumentasi	

2) Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Upacara Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	02 Mei 2025 di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan fungsi Koordinasi dan Sikronisasi dengan Pemda Tambrauw, sekaligus mendorong agar program percepatan mulai disiapkan perencanaannya tetapi juga pelaksanaannya
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Tambrauw; Pemda Kab Tambrauw; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	1. Hasil Sinkronisasi dan Koordinasi Program SSH, Sekolah Berpola Asrama, Sekolah Terbuka dan Penyediaan Penjaminan Mutu Layanan Pendidikan berlangsung baik, tidak ada hambatan yang menghambat implementasi Program Percepatan di Tambrauw 2. Pemda telah bersepakat untuk mengimplementasikan Program Sekolah Berpola asrama dan SSH, sedangkan sekolah terbuka, baru akan dilaksanakan pada tahun 2026
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Rencana Survey Lokus disepakati di Distrik Sausapor dan Kebar direncanakan pelaksanaannya pada akhir Bulan Mei 2025



3) Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Rapat Kerja bersama Panja Komisi II DPR RI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	02 Mei 2025 di Hotel Aston Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) dan untuk meningkatkan peran BP3KOP sebagai badan pengarah percepatan Pembangunan Papua untuk turut bersama pemerintah dalam melaksanakan tugas SHEK dan juga mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah, dan percepatan pembangunan infrastruktur, hingga realisasi dana hibah di Provinsi Papua Barat Daya
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Produktif); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	1. Penandatanganan aset 2. Berdasarkan rapat kerja bersama komisi II DPR RI, dapat diperoleh gambaran umum terkait isu strategis terkait Evaluasi progres penyelenggaraan pemerintah

	Provinsi PBD, pembangunan infrastruktur, hingga realisasi dana hibah di Provinsi Papua Barat Daya
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. Peninjauan kembali pulau di daerah perbatasan Papua dan Maluku yang telah pindah ke wilayah Maluku 2. Point usulan yang menjadi perhatian BP3KOP, diantaranya adalah percepatan Pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya, memantau proses penyelesaian penyerahan P3D dari Provinsi Papua Barat kepada Provinsi Papua Barat Daya, Usulan rencana pemekaran Daerah Bawahan Provinsi Papua Barat Daya, dan perlunya peninjauan kembali status wilayah pulau Sain, Pulau Piai, Pulau Kyas agar dikembalikan masuk ke dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya, serta usulan revisi UU Pemilu agar alokasi jumlah penduduk dibawah 1 juta yang semula 3 kursi dirubah menjadi 5 kursi
Dokumentasi	

4) Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maybrat Tahun 2025-2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	06 Mei 2025 di Gedung Pertemuan SAMUSIRET Vaitmayaf-Kumurkek, Kabupaten Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan; melaksanakan tugas SHEK BP3OKP serta pendampingan terhadap penyusunan RPJMD yang mengacu pada RIPP, RAPPP; menjadi Narasumber dalam kegiatan dimaksud

Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Pemda Kab Tambrauw; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Kelengkapan data yang diperlukan agar segera dilengkapi 2. Perlu ada baseline dan penetapan target serta indikator 3. Melakukan perencanaan dengan menggunakan indikator untuk mencapai target sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 4. Hasil dari kegiatan ini yang pertama bahwa tahapan konsultasi telah selesai dan dilanjutkan dengan perbaikan dan konfirmasi data baik dengan Pemda mitra termasuk BP3OKP yang kedua BP3OKP telah melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi bahwa perencanaan dokumen dan data data yang dilakukan termasuk memberikan arahan kepada tim ahli untuk mengelompokkan OPD berdasarkan misi percepatan agar kolaborasi perencanaan dan program dapat terlaksana dengan baik 5. Data awal untuk finalisasi dokumen RPJMD Kab. Maybrat masih sangat minim sehingga diperlukan data dukung dari tiap OPD 6. BP3KOP berperan penting sebaga mitra dan pengarah dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab. Maybrat
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Pendampingan secara berkala hingga rencana akhir RPJMD Kabupaten Maybrat 2. Rencana tindak lanjut ke depan pada dokumen yang disiapkan dan dokumen yang telah mengalami perubahan karena hasil konsultasi public harapannya juga dapat dilihat dan direview oleh tim pengarah atau BP3OKP agar dapat melaksanakan fungsi harmonisasi terhadap semua dokumen yang digunakan dan baseline capaian target yang akan dikejar



5) Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	06 Mei 2025 di Kantor Dirjen bp Kementerian PU RI, Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Koordinasi terkait pengajuan kenaikan status ruas jalan nasional (Atori-Haimaran-Moswaren-Teminabuan)
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Bupati Kab Sorong Selatan; Kepala Dinas PU PBD; Dirjen Bina Marga KemenPU RI
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan RIPPP (Kondisi Perlu)
Hasil Kegiatan	1. BP3OKP memperkenalkan/mensosialisasikan kelembagaan kepada pihak Dirjen Bina Marga KemenPU 2. BP3OKP mendampingi Pemda Kab Sorong Selatan untuk menyerahkan berkas pengajuan kenaikan status ruas jalan nasional (Atori-Haimaran-Moswaren-Teminabuan), yang kemudian berkas tersebut diterima oleh Dirjen Bina Marga KemenPU 3. Penyampaian isu-isu strategis lainnya juga disampaikan seperti sulitnya air bersih di Kab Sorong Selatan
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Berkas akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Bina Marga KemenPU

Dokumentasi



6) Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Rapat Internal BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	07 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Diskusi terkait dokumen perencanaan Kabupaten Tambrauw (Analisa dan Review)
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK Internal
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Penyelarasan Bersifat Normatif, Belum Substantif Dokumen RPJMD menyebutkan bahwa penyusunan telah berpedoman pada dokumen nasional dan provinsi termasuk RIPPP, namun tidak secara eksplisit memetakan misi RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif) ke dalam struktur misi dan strategi Tambrauw. Penyelarasan hanya bersifat normatif dan deklaratif. 2. Ketiadaan Struktur Khusus Misi RIPPP RIPPP memiliki struktur misi spesifik: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang dijabarkan ke dalam program strategis seperti: Penurunan stunting dan kematian ibu-anak (Papua Sehat), Afirmasi pendidikan bagi OAP dan distribusi guru (Papua Cerdas), Ekonomi lokal berbasis SDA dan teknologi (Papua Produktif). Namun, RPJMD Tambrauw tidak

menggunakan istilah dan kerangka misi ini secara eksplisit dalam struktur pembangunan daerahnya. Misi yang diusung lebih umum dan tidak secara langsung mencerminkan fokus RIPP.

3. Fokus terhadap OAP Kurang Ditegaskan

RIPP secara eksplisit menekankan pembangunan yang afirmatif terhadap Orang Asli Papua (OAP) sebagai pusat perhatian. Sedangkan dalam RPJMD Tambrau, meskipun menyebutkan masyarakat adat dan perlindungan hak-hak adat, keterkaitan program terhadap afirmasi untuk OAP kurang ditegaskan sebagai benang merah dalam semua sektor.

4. Pendekatan “Papua Digital” dan “Transformasi Hijau” Belum Terintegrasi

RIPP menekankan transformasi digital, transisi energi bersih, serta pendekatan ekonomi hijau/ekonomi biru. Meskipun RPJMD Tambrau memuat pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, aspek transformatif digital dan energi baru-terbarukan belum diprioritaskan secara nyata sebagai strategi utama.

5. Pengukuran dan Indikator Tidak Diselaraskan dengan Indikator RIPP

RIPP memiliki indikator yang mengukur keberhasilan lima tahunan berdasarkan tahapan RAPP (Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua). Dalam dokumen RPJMD Tambrau belum terlihat adanya harmonisasi indikator kinerja daerah dengan indikator RAPP sebagaimana dimandatkan dalam Perpres 24/2023 Pasal 3 ayat (1) huruf b.

6. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terus tersedianya hasil review dokumen ranwal RPJMD kabupaten Tambrau dan pokja melaksanakan fungsi SHK terhadap dokumen perencanaan yang sedang disusun oleh OPD teknis.

7. Dari proses review yang ada diharapkan substansi dokumen RPJMD kabupaten Tambrau dapat lebih

	terarah sesuai dengan konteks kebutuhan local daerah, dan selain itu dapat berselaras dengan arah pembangunan nasional.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu dilakukan revisi pada RPJMD Kabupaten Tambrau agar memiliki kesesuaian dengan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. 2. Rencana tindak lanjut adalah kami akan menyampaikan review hasil review kepada Pemda Tambrau dan kami berharap untuk dievaluasi dokumennya diperbaiki dan kami akan melihat dan mengevaluasi kembali pada rancangan akhir RPJMD kabupaten Tambrau. 3. BP3KOP akan terus mengawal proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tambrau secara bertahap mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir penyusunan RPJMD Kabupaten Tambrau.
Dokumentasi	

7) Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Kepala Distrik Maladumes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	08 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan audiensi

Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Kepala Distrik Maladumes
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik dan sinergitas terbangun
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-
Dokumentasi	

8) Kegiatan 8

Nama Kegiatan	Coffe Morning Inisiasi dan Harmonisasi Rencana Program Peningkatan Pariwisata melalui Transportasi Udara di BLU Kantor UPBU Kelas I DEO
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	08 Mei 2025 di Rylich Panorama Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan sebagai narasumber dan menjalankan misi SHEK BP3OKP serta misi Papua Produktif serta untuk membangun kordinasi dan komunikasi sebagai inisiasi dan harmonisasi dalam meningkatkan kapasitas bandara Deo guna menunjang peningkatan potensi wisata di Provinsi Papua Barat Daya
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Produktif); Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD; UPBU Kelas I DEO Sorong; Tamu undangan lainnya

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Upaya percepatan pengembangan bandara Deo Sorong perlu dilakukan guna mendukung kinerja pariwisata di Papua Barat. Selain itu, percepatan pengembangan bandara Deo Sorong diyakini dapat meningkatkan nilai investasi daerah. 2. Secara keseluruhan, "Coffee Morning" ini menjadi platform penting untuk menggalang komitmen dan menyusun strategi bersama guna mengoptimalkan potensi pariwisata Papua Barat Daya melalui peningkatan konektivitas udara. Pembukaan rute baru seperti Sorong-Labuan Bajo diharapkan menjadi salah satu terobosan signifikan untuk mencapai tujuan tersebut.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu sinkronisasi dan harmonisasi program pengembangan bandara Deo dengan kementerian terkait (Menteri Perhubungan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf). 2. Kepala BLU Bandara DEO Sorong harus berkoordinasi terkait timeline pelaksanaan pada rute baru Labuan Bajo-Sorong, untuk mendukung pelaksanaan paket wisata Bahari. 3. Ada koordinasi lanjut dengan Pemrov dan DPRD Prov terkait penyiapan dana bagi intervensi ketersediaan kursi penerbangan Labuan Bajo-Sorong. 4. Ada koordinasi lanjut dengan PemKot Sorong terkait status bangunan yang dibangun PemKot Sorong pada wilayah kerja BLU Bandara DEO Sorong.

Dokumentasi



9) Kegiatan 9

Nama Kegiatan	Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pokja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya Periode s.d. Bulan April 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	09 Mei 2025 di Ruang Rapat KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan dan diskusi terkait pelaksanaan anggaran Pokja BP3OKP PBD periode s.d. bulan Maret 2025; sharing untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran serta meningkatkan peran koordinasi antara Pokja BP3OKP PBD dan KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BP3OKP PBD
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); KPPN Sorong (Kepala, Kabag Umum, PPK Pembantu)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Akan dibicarakan mengenai mekanisme LS dalam GU. 2. Sebelum melakukan perubahan atau pengembangan prosedur terhadap aktifitas pokja BP3OKP hendaknya

	di laksanakan sosialisasi terlebih dahulu apalagi bila tidak ada dalam buku saku. 3. Beberapa hasil koordinasi yang disepakati bersama pertama uang bulanan (UP) untuk Papua Barat Daya perlu dipertimbangkan untuk dinaikkan untuk memasuki periode Triwulan kedua. Melalui informasi PPK ditambahkan menjadi 30.000.000 namun disadari bahwa terjadi keterlambatan reimburse pada Triwulan pertama yang cukup banyak jumlahnya sehingga diusulkan untuk menjadi 50.000.000. Yang kedua bahwa proses reimburse itu ternyata bergantung pada stok persediaan atau GU pada PPK atau KPPN dan ini berdampak ini bergantung pada DOB lain yang serapannya rendah sehingga stok ke atau ganti uang ke kabupaten atau provinsi masing-masing DOB itu saling bergantung dan ini berdampak negatif pada DOB-DOB yang aktivitas pokja nya sangat tinggi. 4. Laporan kinerja dan serapan anggaran untuk Pokja BPP PBD telah melebihi uang persediaan sehingga terjadi kekosongan kas. Hal ini berdampak pada beberapa kegiatan dimana Pokja harus melaksanakan kegiatan dengan pembiayaan pribadi. 5. atakelola keuangan untuk mendukung kinerja BPP PBD dan anggota pokja perlu ditinjau kembali sehingga dapat benar benar mendukung kegiatan anggota BP3OKP PBD secara cepat dan efektif.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Menunggu hasil tindak lanjut dari sekretariat BP3OKP. 2. Kami berharap apa yang sudah disampaikan terutama tentang waktu reimburse kemudian ganti uang ditambahkan jumlahnya dan untuk permohonan GU ke Kanwil baiknya tidak bergantung pada aktivitas penggunaan dana pada DOB lain mengingat aktivitas Papua Barat Daya per bulannya itu kegiatannya sangat banyak contohnya saya pokja cerdas untuk bulan Mei saja saya punya kegiatan itu ada 16 dan hampir semuanya itu terselesaikan dengan baik setengah di

	antaranya adalah terjadi sehingga kalau semua perjanjian itu menggunakan uang pribadi di bulan Mei kemarin kami menghitung untuk voucher dah sendiri itu hampir sekitar 45 sampai 50% uang pribadi yang digunakan dan itu kalau di rata-rata kan itu sekitar 55% dari jumlah honor yang kami terima ini sangat berdampak benar-benar merugikan kami pokja sehingga kami berharap hasil diskusi kami ini dapat difollow up dan dipertimbangkan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. 3. UP (uang persediaan) untuk untuk mendukung program kerja tiap BPP perlu dinaikan sesuai dengan kebutuhan anggota pokja. 4. Dalam hal revolving UP, sebaiknya tidak perlu menunggu tingkat serapan dari BPP lainnya. Jika BPP PBD telah mengajukan laporan dan tidak ada kendala dalam proses revolving selanjutnya, sebaiknya dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu BPP lainnya yang relatif lambat dalam penggunaan dan pelaporan kegiatan.
Dokumentasi	

10) Kegiatan 10

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Kepala Distrik Maladumes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
---------------	--

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	09 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan audiensi
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Kepala Distrik Maladumes; Mahasiswa UNIPA
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	Kepala Distrik menyampaikan kendala terkait permasalahan yang dialami oleh salah satu Mahasiswa UNIPA; Kendala terkait rencana studi mahasiswa pada UNIPA
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Pokja Papua Cerdas BP3OKP PBD membantu followup kepada UNIPA agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan
Dokumentasi	

11) Kegiatan 11

Nama Kegiatan	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) Kabupaten Tambrau Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	14 Mei 2025 di Aula Pertemuan RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Tambrau
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melakukan fungsi Harmonisasi dan sinkronisasi dalam kapasitas sebagai Narasumber pada kegiatan Rakerkesda;

	Melakukan Koordinasi bidang kesehatan bersama stake holder bidang kesehatan dan yang terkait di kabupaten Tambrau
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Produktif); Pemda Kab Tambrau; Dinas Kesehatan Kab Tambrau; RSUD Kelas D Pratama Kab Tambrau; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	1. Perencanaan oleh OPD Bidang kesehatan masih belum sinkron dengan RIPPP. 2. Perlu kolaborasi dalam pelaksanaan beberapa program strategis. 3. Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kabupaten Tambrau adalah bagian dari manajemen pembangunan Kesehatan. hasilnya dari Rakerkesda diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di sektor kesehatan. 4. Ada kesepahaman dan semangat baru, meski pada distrik yang jangkauannya jauh, perlu ada service mobile / pelayanan kesehatan berjalan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. Melakukan review dokumen renstra dinas disesuaikan dengan perencanaan puskesmas. 2. Proses sinkorinsasi, harmonisasi, evaluasi dan kordinasi terkait hasil rakerkesda Kabupaten Tambrau perlu dikawal lebih lanjut sehingga indicator, output dan outcome terkait layanan kesehatan dapat diukur keberhasilannya. 3. Mendorong adanya mobile service heal. 4. Mendorong kesistensi penerapan pemeriksaan kesehatan gratis dan kementerian kesehatan.



12) Kegiatan 12

Nama Kegiatan	Audiensi bersama Panglima Kodam Jaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	14 Mei 2025 di Kodam Jaya, Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan tugas koordinasi dalam rangka tindaklanjut kegiatan Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan BP3OKP se-Papua Raya Tahun 2025
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD, PT & PS; Panglima Kodam Jaya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Kegiatan berjalan dengan baik dan sinergitas terbangun 2. BP3OKP mensosialisasikan atau memperkenalkan kelembagaan pada Kodam Jaya 3. BP3OKP menyampaikan hambatan-hambatan yang dialami 4. Kodam Jaya memberikan respon terkait apa yang disampaikan oleh BP3OKP

	a. Pangdam Jaya akan membantu untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi hambatan Anggota BP3OKP b. BP3OKP perlu mensosialisasikan apa yang menjadi tugas dan fungsi kepada Kodam Kasuari dan Kodam Cenderawasih agar Pangdam yang berada di daerah dapat mendukung/mengawal apa yang menjadi kebutuhan BP3OKP c. BP3OKP perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan Kominfo dalam rangka sosialisasi BP3OKP hingga skala internasional seperti halnya pada saat pelaksanaan kegiatan PON di Papua
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. BP3OKP perlu mensosialisasikan kelembagaan kepada Kodam Kasuari dan Kodam Cenderawasih 2. BP3OKP perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan Kominfo untuk publikasi BP3OKP secara lebih luas hingga skala internasional
Dokumentasi	

13) Kegiatan 13

Nama Kegiatan	Rapat Virtual bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	14 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terhadap program sekolah gratis yang dicanangkan di Kabupaten Sorong Selatan
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	Wacana Program Sekolah Gratis di Sorsel sejauh ini belum didetailkan secara baik, baik itu masalah di sekolah, sumber dana, target dan sasaran penerima serta bagaimana pelaksanaannya. Ini Menjadi Catatan penting oleh Pokja Cerdas untuk melakukan Pendampingan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Perlu Rapat secara Detail dengan semua Pengelolaan Sekolah (Kepala Sekolah/Pengelola BOS) bagi semua tingkatan. Data ini tersedia, dilakukan analisis bersama lalu dituangkan dalam regulasi berupa Perbup.
Dokumentasi	

14) Kegiatan 14

Nama Kegiatan	Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	15 Mei 2025 di Hotel Rylich Panorama Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan sebagai narasumber dan menjalankan tulus SHEK BP3OKP; Menyamakan Persepsi tentang arah kebijakan Nasional dan Daerah yang dipadukan dengan kondisi keadaan daerah melalui pemateri-pemateri (Bappenas RI, Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, BPS dan BP3OKP-PBD)
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Gubernur PBD; Bapperida PBD; BPKP PBD; BPS PB; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Menjalankan tugas Sinkronisasi perencanaan yang dilakukan apakah telah mengacu pada regulasi. 2. Melaksanakan fungsi Koordinasi terhadap beberapa hal yang terindikasi menghambat percepatan pembangunan daerah yakni Keterlambatan Penyelesaian Syarat Salur yang berdampak pada terlambatnya TKD. 3. Tata cara Musrenbang Otsus dilakukan melalui cara yang salah, karena tidak dibagi dalam pokja Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, membuat tidak adanya program bersama antar Kabupaten-Kota-Provinsi guna mendorong program unggulan pada misi-misi ini. 4. BP3OKP melihat bahwa penerapan acara ini, tidak memasukkan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi

	Khusus Papua, sehingga tidak dibagi dalam desk Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.
Rekomendasi/Rencana Tindakanlanjutan	1. Diperlukan Rakor bersama Kanwil DJPK Papua Barat, BP3OKP, BPK, dan Kepala Daerah di Provinsi Papua Barat Daya. 2. Perlu dilakukan koreksi total pada Mayor Program yang didorong pada hasil Murembang Otsus tahun 2026, agar sesuai dengan misi Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif. 3. Merekomendasikan agar hasil Musrembang Otsus dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Papua Barat Daya supaya dievaluasi, terutama pada program-program unggulan yang terkait dengan misi Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif.
Dokumentasi	

15) Kegiatan 15

Nama Kegiatan	Audiensi bersama Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Frega Wenas)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	15 Mei 2025 di Kantor Kementerian Pertahanan RI
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membangun sinergi dan berdiskusi terkait isu-isu strategis di Tanah Papua
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD, PS, PT; Kepala Biro Infohan Kemenhan RI beserta Staf

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	1. Kegiatan berjalan dengan baik dan sinergitas terbangun 2. Kemenhan dalam hal ini Infohan akan mencoba mengkoordinasikan apa yang menjadi hambatan BP3OKP kepada Kementerian terkait 3. Infohan mengapresiasi atas capaian kerja yang telah dilakukan oleh BP3OKP dan berharap bahwa pembangunan di Pulau Jawa bisa juga dirasakan di Tanah Papua
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	-
Dokumentasi	  

16) Kegiatan 16

Nama Kegiatan	Groundbreaking RSUD Kabupaten Raja Ampat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	16 Mei 2025 di Kompleks RSUD Kabupaten Raja Ampat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan peletakan batu pertama RSUD Waisai sebagai bagian dari PHTC berdasarkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI; Melakukan SHEK kepada pimpinan RS lain yang menjadi sasaran PHTC selanjutnya
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat); Menkes RI; Gubernur PBD; Pemda Kab Raja Ampat; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	5 catatan penting dalam sambutan menteri kesehatan di Raja Ampat : - Kualitas dalam pembangunan, pastikan sesuai dengan standar dan jangan ada bangunan yang dibuat asal asalan. Bangunan harus kokoh - Perlu master plan yang dibuat dengan disahkan oleh peraturan kepala daerah (gubernur) - Menyiapkan SDM yang akan menyelenggarakan layanan - disediakan beasiswa kemkes dan LPDP - Tata Kelola harus diperbaiki - kebanyakan RS Pemerintah lemah dalam tata kelola - Mengutamakan pencegahan penyakit dengan memanfaatkan program Quick Win lain yaitu Cek Kesehatan Grati (CGK) Note : Ukuran kinerja kepala dinas kesehatan, disebut berhasil adalah bila RS sepi karena semua masyarakatnya sehat. - Perlu perencanaan secara komprehensif yang melibatkan daerah yang disasar dan bukan berlaku secara top-down. - Data dasar yang menjadi alasan pembangunan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan daerah

	sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan misal : data penyakit jantung sebagai pembunuh pertama secara global apakah sesuai dengan data daerah tingkat kematian tertinggi masih disebabkan oleh penyakit infeksi.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perencanaan kelengkapan RS Kabupaten hendaknya memperhatikan data dasar sesuai dengan masing-masing daerah secara khusus dan bukan data global yang belum tentu sesuai dengan kondisi lokal, misalnya data penyakit terbanyak dan data kematian terbanyak akibat penyakit. 2. Melengkapi RS di daerah dengan peralatan canggih hendaknya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai operasional peralatan tersebut serta kemampuan kelistrikan yang bila tidak diperhitungkan dengan baik maka berpotensi memberi kontribusi terhadap kerusakan alat canggih dan memerlukan biaya perbaikan yang tidak murah.
Dokumentasi	

17) Kegiatan 17

Nama Kegiatan	Rapat Konsultasi Usulan Rencana Kerja SKALA Wilayah Papua 2025-2026
---------------	---

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	16-17 Mei 2025 di Hotel Aston Makassar
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan dan berkoordinasi/diskusi terkait usulan rencana kerja SKALA wilayah Papua tahun 2025-2026; Terinformasinya Perwakilan Pemerintah Provinsi dan Perwakilan KL tentang kemajuan pelaksanaan Kegiatan SKALA di wilayah Papua sampai dengan Mei 2025 dalam masing-masing tema; Teridentifikasinya usulan output prioritas untuk pelaksanaan SKALA periode Juli 2025 – Desember 2026; Disepakatinya usulan Rencana Kerja 2025/2026 dari Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dengan KL
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Produktif); SKALA; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Dari kegiatan ini diperoleh gambaran terkait kemajuan rencana kerja 2024-2025 & pemetaan prioritas kedepan program skala Provinsi Papua Barat Daya (dokumen selengkapnya dapat diakses pada link berikut) : https://drive.google.com/file/d/1d-6OjTdY82holoSxpPmAR71Jb237vuYP/view?usp=drive_link Rencana kerja untuk 2025-2026 selanjutnya dikelompokkan menjadi 4 tema besar yang terdiri dari beberapa rencana aksi (Thematic action plan-TAP) sebagai berikut : 1. Tema 1: Penguatan Partisipasi, Representasi, dan Pengaruh Kelompok Rentan dalam Perencanaan dan Proses Pengambilan Keputusan (GEDSI) TAP 1 : Partisipasi, Representasi, dan Pengaruh Kelompok Rentan dalam Perencanaan dan Proses Pengambilan Keputusan. 2. Tema 2: Penguatan Penyediaan dan Pemanfaatan Data yang Mendukung Penyediaan Layanan Inklusif, termasuk Pengelolaan Data Terintegrasi (DNA) yang

	terdiri dari : TAP 2: Kebijakan dan Kelembagaan Satu Data Daerah; TAP 3: Sistem Informasi Tingkat Desa; TAP 4: Sistem dan Integrasi Antar Sistem Pengelolaan Data; TAP 5: Analisis dan Pemanfaatan Data. 3. Tema 3 : Peningkatan Kualitas Belanja Daerah (SPM) yang terdiri dari : TAP 6: Pengelolaan Implementasi Penerapan SPM; TAP 7: Perencanaan Daerah untuk Penerapan dan Pemenuhan Layanan Dasar Inklusif, TAP 8: Penganggaran Daerah untuk Penerapan dan Pemenuhan Layanan Dasar Inklusif TAP 9: Perencanaan dan Penganggaran Dana OTSUS.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BP3OKP perlu melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap prioritas rencana kerja daerah pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mencakup aspek : 1. Perencanaan Daerah, SPM, Partisipasi Masyarakat. 2. TKD, Pendapatan Asli Daerah, Penganggaran. 3. Forum Data, SID, Integrasi Sistem, Pemanfaatan Data. 4. Pengelolaan Dana Otsus.
Dokumentasi	

18) Kegiatan 18

Nama Kegiatan	Lokakarya Internal Model Tetap Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	19 Mei 2025 di Kampus Universitas Papua, Manokwari
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membahas terkait model tetap program SSH sebagai model baku yang akan digunakan/diimplementasikan sebagai program percepatan misi Papua Cerdas di Tanah Papua;

	Melakukan Finalisasi Model yang pakem yang akan diimplementasikan sebagai Program Percepatan di Tanah Papua
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Dekan FKIP UNIPA; Tim SSH Kab Sorong Selatan; Tim SSH Kab Maybrat; Tim SSH Wamena
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Bahwa telah disepakati untuk melaksanakan Model Pendidikan SSH yang dikembangkan dari sorong selatan, Pusat Inovasi Pendidikan disepakati untuk didirikan untuk itu naskah akademiknya perlu disiapkan oleh Tim
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. Dokumen SSH perlu sisipkan dalam rangka Sosialisasi ke Kab/Kota yang dikelompokkan sebagai Lokpri melalui Pokja cerdas BPP di 6 Provinsi yang ada di Tanah Papua 2. Menyiapkan Pendirian Pusat Studi Inovasi Pendidikan di Unipa
Dokumentasi	

19) Kegiatan 19

Nama Kegiatan	Pelaksanaan Desk RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	19 Mei 2025 di Hotel Rylich Panorama Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan; Melakukan fungsi pengawasan dalam proses perencanaan program di

	Provinsi Papua Barat Daya; Melakukan Fungsi memberi arahan dalam perencanaan program di Provinsi Papua Barat Daya; Melakukan fungsi evaluasi dalam kegiatan perencanaan program di Provinsi Papua Barat daya
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Pimpinan dan Anggota MRP; Pimpinan dan Anggota DPR PBD; Kepala Bappeda/Bappelitbangda Kota/Kab se-PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Musrenbang RKPD yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua Barat Daya belum mengikuti kaidah pelaksanaan MUSRENBANG sesuai Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua 2. Akibatnya, template yang diisi oleh OPD masih ada yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu pengkajian kembali pelaksanaan Musrenbang Otsus dan RKPD agar tidak terulang lagi di kemudian hari 2. Mohon kepala OPD terkait dapat mempelajari regulasi sebelum melaksanakan suatu kegiatan yang jelas ada regulasi pelaksanaan teknisnya
Dokumentasi	

20) Kegiatan 20

Nama Kegiatan	Internalisasi Kesesuaian RIPPP dan Draft Perpres RAPPP di Wilayah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	19 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya secara Virtual (Daring)
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan; Menyatukan visi pembangunan Papua antara pusat dan daerah; Menyesuaikan program pusat dengan konteks lokal (geografis, adat, budaya, sosial-ekonomi); Menghindari tumpang tindih program dan mendorong efisiensi anggaran; Meningkatkan rasa kepemilikan pemerintah daerah dan masyarakat atas program nasional; Menjamin percepatan pembangunan Papua berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan
Peserta Kegiatan	Internal BP3OKP/BPP (Sekretariat BPP Jayapura dan Seluruh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi di wilayah Papua sekaligus dengan Anggota Pokja)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Dari Internalisasi Kesesuaian RIPPP dan Draft Perpres RAPPP diharapkan, RAPPP dapat segera ditetapkan dalam Keputusan Perpres sehingga memiliki legal standing dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah seperti RPJMD dan RPJPD.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BP3OKP memiliki peran strategis untuk mempercepat proses legalisasi RAPPP melalui peraturan presiden



21) Kegiatan 21

Nama Kegiatan	Workshop Penyusunan Rencana Aksi SPM Provinsi Wilayah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	19-21 Mei 2025 di Hotel Aston Makassar
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan; Penguatan pemahaman perangkat daerah tentang update regulasi terbaru terkait SPM; Penguatan pemahaman perangkat daerah dalam melakukan analisis dan peghitungan kebutuhan pembiayaan SPM, merumuskan kebijakan dan strategi jangka menengah; Penguatan pemahaman perangkat daerah dalam Menyusun perencanaan monitoring dan pelaporan implementasi penerapan SPM; Mendorong pemanfaatan data terpilah kelompok rentan dalam penargetan SPM; Mendorong pengintegrasian Renaksi SPM kedalam dokumen perencanaan daerah; Penyepakatan tindak lanjut penyusunan Renaksi tiap Provinsi
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Produktif); SKALA; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Dalam penyusunan SPM, untuk kelompok OPD Papua Barat Daya dihadapkan dengan beberapa kendala :

	1. Tidak semua OPD hadir, terutama OPD yang terkait dengan pelayanan dasar wajib. 2. Ketersediaan data dukung pada tiap OPD masih sangat kurang sehingga terkendala menyusun SPM pada saat kegiatan berlangsung. Langkah selanjutnya disepakati akan diselesaikan selama periode bulan juni tahun 2025, dengan menyelesaikan beberapa tahapan kegiatan dibawah ini 1. FGD Penyusunan Renaksi dan Pelaporan SPM. 2. Finalisasi Matrix Renaksi SPM (6 bidang). 3. Pergub Renaksi SPM. 4. Target Pengisian SPM Q2. 5. Revisi SK Tim.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BP3OKP perlu melakukan kordinasi dengan mengambil langkah komunikasi kepada pihak Baperida, untuk selanjutnya dapat menyelesaikan tahapan kegiatan finalisasi SPM.
Dokumentasi	

22) Kegiatan 22

Nama Kegiatan	Audiensi bersama BPKP Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	20 Mei 2025 di Kantor BPKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membangun sinergi dan berdiskusi terkait isu-isu strategis di Tanah Papua; Menyamakan persepsi terhadap fungsi pengawasan masing-masing lembaga; Untuk saling berkoordinasi dalam melakukan evaluasi terhadap

	perencanaan yang sedang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Barat Daya
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat); Kepala BPKP PBD dan Staf
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	1. BP3OKP dan BPKP Provinsi Papua Barat Daya memiliki kesepakatan bersama bahwa Papua telah dikembangkan dalam paradigma baru, yakni dalam wujud RIPPP dan RAPPP yang misalnya dalam dilihat pada Pepres 12 Tahun 2025. Sehingga berbagai program daerah harus disusun selaras dan serasi. Untuk itu harus ada kerjasama antar BPKP dan BP3OKP sehingga ada kesamaan langkah pengawasan di tingkat daerah untuk mendorong penerapan misi Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif. Pertemuan ini, juga akan dikoordinasikan lanjut dengan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya, sehingga ada koordinasi yang baik pada semua sektor pengawasan. 2. BPKP adalah Lembaga pengawas internal Pemerintah daerah. Dalam pengawasannya BPKP memerlukan bantuan dari stakeholder yang ada khususnya BP3OKP sebagai Lembaga pengarah. 3. BPKP memberi laporannya kepada presiden melalui BPKP pusat tiap triwulan. BPKP juga memberikan laporan eksekutif daerah kepada Gubernur, ada rekomendasinya, perlu bantuan BP3OKP untuk mempertajam rekomendasinya. 4. Dalam menjalankan tugas BPKP memerlukan peran penting dari Inspektorat tiap daerah memberikan laporan dan pengawasan. 5. Perlu kerja ekstra dalam mendampingi pemda karena masih minim pemahaman tentang tata Kelola TKD yang baru.

	6. DEPUTI PENCEGAHAN KPK -- fokus perencanaan anggaran -- potensi tidak efektif -- berpotensi kerugian negara. 7. Setiap 3 bulan menyampaikan laporan kepada pak presiden -- sering berkoordinasi untuk isu daerah yg akan menjadi isu Nasional. Dalam perencanaan berbasis regulasi -- akan dilihat apa saja yang berdampak negatif pada pembangunan nasional. 8. Setiap tahun BPKP memiliki program pengawasan. 9. Menurunkan prevalensi stunting -- strateginya adalah spesifik dan sensitif -- grand design penurunan stunting -- Berapa % target penurunan, bagaimana rencana intervensinya. 10. Perencanaannya sudah bagus namun anggarannya yg belum bagus. 11. Optimalisasi peran Inspektorat -- rencana mengumpulkan inspektorat. Ketika perencanaannya bagus apakah penganggarannya bagus? 12. PHTC apakah potensi potensi yg bisa menghambat hal ini tidak berjalan dengan mulus -- harus dijaga agar alkes jangan sampai rusak karena tidak dipakai? 13. Trend bantuan dengan BPJS -- harus disesuaikan dahulu. 14. Kolaborasi dengan legislatif • pikir boleh namun hrs masuk dalam perencanaan - rkpd- kua ppas -- rpjmd itu adalah produk antara eksekutif dan legislative. • pikir jangan masuk dalam kolaborasi atau perencanaan yg sudah ditetapkan, Mens rea. • saat anggota dewan mendorong perencanaan yg tidak sesuai maka dampaknya kerugian negara.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu kolaborasi pengawasan antara BP3OKP bersama dengan BPKP. 2. Akan dilakukan pertemuan rutin dan tukar informasi rutin antar kedua lembaga, BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya dan BPKP Wilayah Provinsi Papua Barat Daya

	untuk mengawasi berbagai proses pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. 3. Pemda perlu melibatkan BPKP dalam tiap tahap, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan serta evaluasi agar BPKP memberi pendampingan secara baik. 4. Harus ada kontrol terhadap legislative karena bnyak penganggaran masuk lewat situ. Sinergi dengan legislative agar usulannya selaras dengan regulasi agar tidak menyalahi aturan, pikir boleh ada tetapi sesuai aturan (RJMD). 5. BPKP dalam melaksanakan tugasnya perlu bersinergi dengan stakeholder yang ada khususnya BP3OKP sebagai badan pengarah.
Dokumentasi	

23) Kegiatan 23

Nama Kegiatan	Penutupan Musrenbang Otsus dan RKPD Papua Barat Daya Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	20 Mei 2025 di Hotel Rylich Panorama Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan; Penandatanganan berita acara hasil musrenbang

Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD; Gubernur PBD; Pemda PBD; Bapperida PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. BP3OKP belum melakukan penandatanganan berita acara Musrenbang. 2. Karena landasan kegiatan tidak Berjalan Sesuai dengan Peraturan Bapenas Nomor 1 Tahun 2025, karena pembagian desk tidak sesuai dengan topik dalam desk Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, maka hasil yang dicapai tidak maksimal. 3. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyepakati pagu indikatif dana Otsus Tahun Anggaran 2026, yang meliputi: • Block Grant: Rp173,13 miliar • Specific Grant: Rp209,53 miliar • Dana Tambahan Infrastruktur: Rp126,05 miliar • Dana Bagi Hasil Migas Otsus: Rp55,49 miliar 4. Di samping itu, usulan program dari kabupaten/kota mencakup: • Papua Sehat: Rp1,09 triliun • Papua Cerdas: Rp259,23 miliar • Papua Produktif: Rp1,49 triliun
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Bekerja sama dengan BPKP Provinsi akan melakukan pengawasan yang lebih ketat pada berbagai kegiatan, sebab tahapan perencanaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Dokumentasi



24) Kegiatan 24

Nama Kegiatan	Presentasi Pimpinan OPD Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	21 Mei 2025 Gedung Pertemuan Hotel Mratuwa, Teminabuan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan sebagai Panelis; Melakukan fungsi SHEK terhadap perencanaan program pimpinan OPD di kabupaten Sorong Selatan; Memberikan saran dan arahan bagi Bupati Kabupaten Sorong Selatan untuk menyelaraskan program OPD terhadap isu strategis daerah sehingga terjadi efisiensi anggaran serta efektifitas program kerja
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas); Usulan/Calon Pokja BP3OKP PBD; Bupati Kab Sorong Selatan; Pemda Kab Sorong Selatan; Seluruh OPD di lingkungan Kab Sorong Selatan; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	Pokja Papua Sehat Presentasi pimpinan OPD sebagian besar tidak menghasilkan keselarasan antara isu strategis-perencanaan strategis-program strategis.

Permasalahan Utama atau Isu Strategis yang Dihadapi Kabupaten Sorong Selatan :

1. Kurangnya Literasi OPD terhadap Regulasi: Masih terdapat kendala dalam pemahaman dan implementasi regulasi perencanaan, termasuk sinkronisasi program daerah dengan program nasional seperti Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Ranwal RPJMD (hal. 292) menyebutkan "Belum optimalnya tata kelola pemerintahan" yang dapat mencerminkan isu ini. Contohnya, belum optimalnya dukungan program prioritas daerah terhadap program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang lokus prioritasnya telah ditetapkan dalam RPJMN untuk Kabupaten Sorong Selatan. Demikian pula, pemanfaatan pendanaan dari Kementerian Sosial untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dari Kementerian Kesehatan belum maksimal. Lampiran VI Keppres 12 Tahun 2025, menekankan pentingnya program spesifik yang mungkin belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perencanaan OPD.
2. Sinkronisasi Program Antar-OPD Belum Optimal: Masih terjadi tumpang tindih atau kurangnya koordinasi dalam usulan program kegiatan antar OPD. Ranwal RPJMD (hal. 293) tidak secara eksplisit menyebutkan ini sebagai judul permasalahan, namun berbagai permasalahan urusan (misalnya hal. 294-301) mengindikasikan perlunya pendekatan terpadu. Sebagai contoh, data penerima bantuan beasiswa antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial belum sepenuhnya sinkron, yang berpotensi menimbulkan pendobelan bantuan.
3. Ego Sektoral Antar OPD: Terdapat indikasi adanya ego sektoral yang menghambat kolaborasi dan integrasi program lintas OPD. Ini sejalan dengan permasalahan "Belum optimalnya tata kelola pemerintahan" dan kebutuhan akan sinkronisasi yang lebih baik. Contohnya, penetapan target capaian oleh beberapa

OPD (misalnya Dinas Kominfo dan BNPB) terkadang kurang memperhatikan keterkaitan dengan program OPD lain yang bersinggungan.

4. Perencanaan Belum Sepenuhnya Berbasis Data: Ketersediaan data dasar (baseline data) yang ter-update untuk berbagai variabel pembangunan (seperti IPM, Angka Harapan Hidup) masih menjadi tantangan. Ranwal RPJMD (hal. 292) menyebutkan "Kualitas data dan informasi belum optimal" sebagai salah satu permasalahan. OPD teknis seringkali harus melakukan pendataan berulang kepada penerima manfaat, padahal idealnya sudah memiliki data sektoral baku yang ter-update untuk mengukur keberhasilan program bantuan/hibah.
5. Kurangnya Harmonisasi dengan Program Unggulan Presiden: OPD terkait belum sepenuhnya melakukan langkah-langkah harmonisasi dengan berbagai program unggulan presiden yang baru, seperti Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Rumah 3 Juta Unit/ Tahun, dalam konteks perencanaan daerah. Ranwal RPJMD (hal. 311) menyebutkan "Program Makan Bergizi Gratis" sebagai isu strategis yang perlu diakomodasi.
6. Tidak adanya Program Unggulan : OPD terkait tidak melakukan penyelerasan untuk penyusunan program dengan fokus kepada potensi daerah, semisalnya Pengembangan Pariwisata (festival budaya/kuliner) dan potensi udang tangkap serta agrobisnis.

Pokja Papua Cerdas

Giat dibuka oleh Bupati Sorong Selatan, dilanjutkan dengan Arahan dari Anggota BP3OKP Papua Barat Daya, Materi berkaitan dengan Definisi lembaga ini, Tujuan, Tusi dan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP3OKP periode Januari-Mei 2025. Giat dilanjutkan dengan presentasi OPD, OPD dikelompokkan berdasarkan Misi Sehat, cerdas,

Produktif dan Papua Damai. Setelah selesai OPD presentasi, tim Pokja memberikan beberapa respons yakni :

1. Perencanaan Wajib Berbasis RIPPP atau setidaknya mengacu pada Perpres 12 tahun 2025,
2. Visi Misi Bupati wajib diterjemahkan dalam Capaian Baselinenya,
3. Penyusunan program perlu kolaborasi antar OPD (Salah satu strategi menyusun perencanaan di era Efisiensi),
4. Program Strategis Prioritas Daerah sesuai amanat PMK 33 tahun 2024 perlu didesain agar mendorong sinergi dana APBD dan Dana Desa,
5. Penguatan Pemerintahan Distrik perlu dilakukan agar pengawasan pembangunan berjalan baik dan tepat sasaran

Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini adalah Tim Pokja dapat melakukan Sosialisasi dan Sinkronisasi RIPPP dan aturan turunannya kepada OPD yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan Dokreda, baik RPJMN maupun Renstra OPD masing-masing.

Tambahan dari Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD

1. Kegagalan Mencapai "Papua Produktif" Akibat :
 - a. Kurangnya literasi regulasi, sinkronisasi antar-OPD belum optimal, ego sektoral, perencanaan belum berbasis data, kurangnya harmonisasi dengan program presiden, dan tidak adanya program unggulan daerah.
 - b. Contoh : 1) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perindagkop tidak akan bisa mengembangkan agrobisnis sagu atau udang tangkap secara optimal jika tidak ada program unggulan yang jelas, data yang akurat, dan koordinasi yang baik antar mereka (masalah sinkronisasi dan ego sektoral) ; 2) Dinas

Pariwisata tidak bisa mengembangkan festival budaya/kuliner sebagai program unggulan jika perencanaannya lemah dan tidak didukung data potensi yang valid.

- c. Semua kinerja OPD yang terkait dengan Papua Produktif akan terhambat jika literasi mereka terhadap regulasi seperti RIPP (yang mengarahkan pembangunan Papua) rendah.

2. Permasalahan Utama atau Isu Strategis yang Dihadapi Kabupaten Sorong Selatan :

- a. Kurangnya Literasi OPD terhadap Regulasi: Masih terdapat kendala dalam pemahaman dan implementasi regulasi perencanaan, termasuk sinkronisasi program daerah dengan program nasional seperti Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP). Ranwal RPJMD (hal. 292) menyebutkan "Belum optimalnya tata kelola pemerintahan" yang dapat mencerminkan isu ini. Contohnya, belum optimalnya dukungan program prioritas daerah terhadap program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang lokus prioritasnya telah ditetapkan dalam RPJMN untuk Kabupaten Sorong Selatan. Demikian pula, pemanfaatan pendanaan dari Kementerian Sosial untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dari Kementerian Kesehatan belum maksimal. Lampiran VI Keppres 12 Tahun 2025, menekankan pentingnya program spesifik yang mungkin belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perencanaan OPD.
- b. Sinkronisasi Program Antar-OPD Belum Optimal: Masih terjadi tumpang tindih atau kurangnya koordinasi dalam usulan program kegiatan antar OPD. Ranwal RPJMD (hal. 293) tidak secara eksplisit menyebutkan ini sebagai judul permasalahan, namun berbagai permasalahan

urusan (misalnya hal. 294-301) mengindikasikan perlunya pendekatan terpadu. Sebagai contoh, data penerima bantuan beasiswa antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial belum sepenuhnya sinkron, yang berpotensi menimbulkan pendobelan bantuan.

- c. Ego Sektoral Antar OPD: Terdapat indikasi adanya ego sektoral yang menghambat kolaborasi dan integrasi program lintas OPD. Ini sejalan dengan permasalahan "Belum optimalnya tata kelola pemerintahan" dan kebutuhan akan sinkronisasi yang lebih baik. Contohnya, penetapan target capaian oleh beberapa OPD (misalnya Dinas Kominfo dan BNPB) terkadang kurang memperhatikan keterkaitan dengan program OPD lain yang bersinggungan.
- d. Perencanaan Belum Sepenuhnya Berbasis Data: Ketersediaan data dasar (baseline data) yang ter-update untuk berbagai variabel pembangunan (seperti IPM, Angka Harapan Hidup) masih menjadi tantangan. Ranwal RPJMD (hal. 292) menyebutkan "Kualitas data dan informasi belum optimal" sebagai salah satu permasalahan. OPD teknis seringkali harus melakukan pendataan berulang kepada penerima manfaat, padahal idealnya sudah memiliki data sektoral baku yang ter-update untuk mengukur keberhasilan program bantuan/hibah.
- e. Kurangnya Harmonisasi dengan Program Unggulan Presiden: OPD terkait belum sepenuhnya melakukan langkah-langkah harmonisasi dengan berbagai program unggulan presiden yang baru, seperti Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Rumah 3 Juta Unit/Tahun, dalam konteks perencanaan daerah. Ranwal RPJMD (hal. 311) menyebutkan "Program Makan

	Bergizi Gratis" sebagai isu strategis yang perlu diakomodasi. f. idak adanya Program Unggulan : OPD terkait tidak melakukan penyelerasan untuk penyusunan program dengan fokus kepada potensi daerah, semisalnya Pengembangan Pariwisata (festival budaya/kuliner) dan potensi udang tangkap serta agrobisnis sagu.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Pokja Papua Sehat 1. Perbaikan terhadap Struktur Presentasi Program Kerja OPD: Judul: PAPARAN PROGRAM KERJA [Nama OPD] Nama kepala OPD Tanggal & lokasi Logo daerah/OPD 2. Tugas dan Fungsi OPD (Opsional) Menampilkan mandat OPD berdasarkan Perda atau Permendagri Uraian ringkas fungsi strategis OPD 3. Capaian Kinerja Tahun Lalu Indikator utama yang dicapai (misalnya: realisasi fisik dan keuangan) Highlight program unggulan atau inovasi Grafik/Sankey chart realisasi anggaran 4. Permasalahan dan Tantangan Masalah internal (SDM, sarpras, anggaran) Masalah eksternal (kebijakan pusat, kebutuhan masyarakat) Bisa ditampilkan dalam bentuk SWOT sederhana 5. Prioritas Program dan Kegiatan Tahun Berjalan / Mendatang (tabel) Pokja Papua Cerdas Diperlukan sinkronisasi dan pendampingan lebih lanjut terhadap tahapan penyusunan Renstra OPD.

Tambahan

1. Membangun Komunikasi dengan BAPEDA Sorong Selatan agar membentuk atau mengoptimalkan Forum Koordinasi OPD Lintas Sektor. Sehingga ada agenda rutin membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program strategis yang bersifat lintas OPD, khususnya yang mendukung pilar "Papua Produktif" dalam RIPPP. Karena dengan demikian akan mendorong : 1) membuat program bersama, berbasis data, yang selaras dengan program nasional dapat menjadi program unggulan yang bukan saja dikerjakan antara lintas OPD tetapi juga hingga kepada lintas Wilayah (antar kabupaten dan Provinsi).
2. Penyusunan Rencana Program Kerja OPD Kabupaten Sorong Selatan, yang akan diturunkan dari Ranwal RPJMD 2025-2029 ini, merupakan instrumen vital untuk menerjemahkan visi-misi pembangunan daerah ke dalam aksi nyata yang terukur. Berdasarkan review atas Ranwal RPJMD dan isu strategis yang dihadapi, beberapa rekomendasi utama untuk penyusunan dan pelaksanaan program kerja OPD adalah:
3. Penguatan Kapasitas Perencanaan OPD: Meningkatkan pemahaman OPD terhadap regulasi perencanaan terbaru, termasuk RIPPP (Lampiran IV Keppres 12 Tahun 2025) dan program prioritas nasional serta presiden, untuk memastikan sinkronisasi dan relevansi program. Hal ini untuk mengatasi "Kurangnya Literasi OPD terhadap Regulasi".
4. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar-OPD: Membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif melalui forum-forum reguler dan platform bersama untuk menghindari tumpang tindih program dan ego sektoral, khususnya dalam program yang bersifat lintas sektoral. Ini menjawab "Sinkronisasi Program Antar-OPD Belum Optimal" dan "Ego Sektoral Antar OPD". Hal ini

membuat tidak munculnya Program Unggulan yang bisa didorong bersama berbagai OPD.

5. Penguatan Perencanaan Berbasis Data: Mendorong penguatan sistem pendataan daerah yang akurat, terintegrasi, dan ter-update (termasuk Satu Data Indonesia) sebagai dasar utama penyusunan program. OPD teknis perlu didukung untuk membangun dan memelihara data sektoral yang valid untuk penetapan sasaran dan penerima manfaat, mengatasi "Perencanaan Belum Sepenuhnya Berbasis Data".
6. Harmonisasi dengan Program Nasional dan Presiden: OPD terkait perlu proaktif dalam mengintegrasikan dan mengharmonisasikan program unggulan nasional dan presiden (misalnya Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih dan Pembangunan Rumah 3 Juta Unit/Tahun) ke dalam program kerja daerah dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik daerah. Ini untuk mengatasi "Kurangnya Harmonisasi dengan Program Unggulan Presiden".
7. Fokus pada Penyelesaian Isu Strategis Daerah: Program kerja OPD harus secara tajam diarahkan untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dalam Ranwal RPJMD, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas SDM, tingginya kemiskinan dan ketimpangan, gangguan kamtibmas, serta penurunan kualitas lingkungan hidup.
8. Implementasi dan Monitoring yang Ketat: Setelah program kerja disusun dan ditetapkan dalam Renstra OPD, diperlukan komitmen kuat dalam implementasi serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan (sebagaimana diamanatkan dalam Bab V Ranwal RPJMD) untuk memastikan pencapaian target dan sasaran.

Dokumentasi



25) Kegiatan 25

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama Bupati Kabupaten Sorong Selatan ke RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	21 Mei 2025 di RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan kunker bersama Bupati Kabupaten Sorong Selatan
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Pemda Kab Sorong Selatan; Dinas Kesehatan Kab Sorong Selatan; Pengurus RSUD Scholoo Keyen Kab Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	Kegiatan monev berjalan dengan baik
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	-
Dokumentasi	

26) Kegiatan 26

Nama Kegiatan	Audiensi bersama Perusahaan Sawit (PT ANJ)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	22 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan audiensi dari PT ANJ dan memperkenalkan/ mensosialisasikan kelembagaan BP3OKP
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; PT ANJ; Tokoh Masyarakat Kabupaten Maybrat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	1. Kelembagaan BP3OKP tersosialisasi dengan baik 2. BP3OKP menerima informasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Perusahaan Sawit dan akan membantu untuk memfollowup kepada Dinas terkait
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BP3OKP akan mengadakan rapat koordinasi dengan Pemda dan Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota terkait sebagai upaya tindaklanjut penyelesaian permasalahan/hambatan yang dialami oleh Perusahaan Sawit
Dokumentasi	

27) Kegiatan 27

Nama Kegiatan	Launching Program Sekolah Gratis di Kabupaten Sorong Selatan
---------------	--

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	23 Mei 2025 di Lapangan Trinati Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan; Melaksanakan Koordinasi program sekolah Gratis bersama Disdik Sorsel, sekaligus menghadiri Giat Launching sekolah gratis oleh Gubernur PBD di Lapangan Trinati Kabupaten Sorong Selatan
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); Pemda Kab Sorsel; Bupati Kab Sorsel; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sorsel; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	Bahwa Pemda Provinsi hanya mengcover Pembiayaan Penerimaan Murid Baru, sedangkan untuk kegiatan sekolah gratis secara detail pelaksanaan program ini belum jelas Juknis dan Pergubnya. Hasil koordinasi H-1 sebelum Launching Pokja Cerdas bersama Bupati Sorsel dan Disdik; terkonfirmasi Program ini menggunakan Dana BOS (BOS APBN), hal ini membutuhkan sinkronisasi juknis penggunaannya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Mengingat proses sinkronisasi pelaksanaan program ini belum jelas, Pokja telah meminta agar OPD Teknis mempersiapkan data untuk mempresentasikan secara detail mekanisme pelaksanaan program Sekolah Gratis di Sorsel.
Dokumentasi	

28) Kegiatan 28

Nama Kegiatan	Audiensi bersama Kapolda Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	23 Mei 2025 di Mako Polda Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Sosialisasi BP3OKP; Membangun Sinergitas; Melaksanakan fungsi koordinasi guna dukungan, kerja sama dan kolaborasi bersama
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Anggota Pokja BP3OKP PBD (Produktif); Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD; Kapolda PBD, Wakapolda PBD, Irwasda, Dirbinmas, Dirltkam Polda PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	1. Kelembagaan BP3OKP tersosialisasi dengan baik. 2. Terkait usulan personil untuk mendukung fungsi dan kerja pokja Papua Damai, Pihak polda Papua Barat Daya akan berproses secara administrative, walaupun polda Papua Barat Daya saat ini masih terbatas secara personalia. 3. Kondisi Keamanan dan ketertiban wilayah sorong dan beberapa kabupaten lainnya menjadi perhatian serius BP3OKP, oleh karena itu diharapkan peran kolaborasi Polda Papua Barat Daya bersama unit Polres dan Polsek untuk mengotimalkan fungsi kamtibmas yang tentunya dapat berkolaborasi dengan Masyarakat. 4. Beberapa program dan kegiatan terkait fungsi dan peran BP3OKP akan berkolaborasi dengan pihak Polda Papua Barat Daya. 5. Akan ada penertiban pasar dan penerangan dari babinkamtibmas terkait memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam program pemerintah, yakni ketahanan pangan dan Makan Bergisi Gratis, sehingga ada ketersediaan bahan makanan lokal. 6. Perlu ada pembentukan tim reaksi cepat dari Polda untuk menangani kasus - kasus kriminal.

	7. Perlu ada interaksi yang lebih baik dengan tokoh pemuda/gereja/adat/perempuan pada pusat aktivitas pesta jalanan (pusat kriminalitas) di kota sorong, sehingga bisa meredam berbagai tindak kriminal. 8. Keterbatasan Fasilitas dan SDM yang menghambat pelayanan di Polda PBD. 9. Identifikasi gangguan kamtibmas di wilayah polda PBD masih tergolong ringan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. BP3OKP akan terus melaksanakan fungsi kordinasi bersama polda Papua Barat Daya untuk bersinergis mendukung program pemerintah. 2. Perlu segera dilengkapi anggota Pokja Papua Damai/Desk Polhukam di Papua Barat Daya, mengingat persoalan kriminalitas yang tinggi, yang bisa menjadi sumber persoalan ekonomi dan bahkan disitegrasi bangsa. 3. BP3OKP PBD akan menyurat kepada Kapolda PBD terkait permohonan usulan calon Anggota Pokja Polhukam/Damai. 4. Lahan untuk Pembangunan POLDA PBD, BP3OKP akan berkoordinasi dengan Gubernur terkait penyediaan lahan.
Dokumentasi	

29) Kegiatan 29

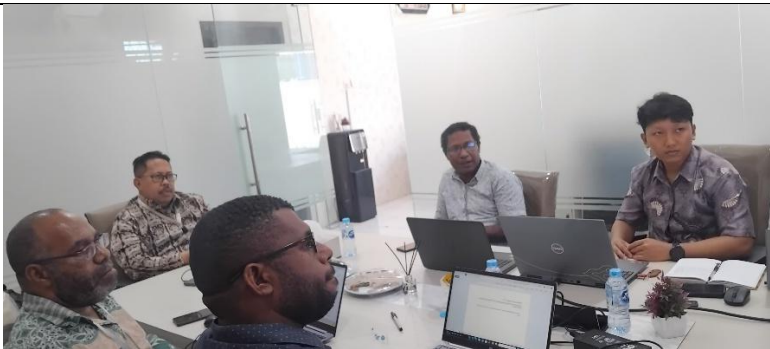
Nama Kegiatan	Sosialisasi Anti Korupsi Pemerintah Daerah Se-Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	23 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD; Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	Dari pengelompokan ini, beberapa tema utama masalah yang muncul dan saling terkait adalah: 1. Defisit Integritas dan Perilaku Pejabat: Masalah ini mencakup kurangnya pemahaman integritas, mindset yang salah, kurangnya komitmen nyata, dan minimnya teladan. Ini adalah masalah fundamental dari sisi individu dan kepemimpinan. 2. Kerapuhan Sistem Tata Kelola Keuangan: Sistem yang ada belum mampu mencegah korupsi dan inefisiensi, mulai dari perencanaan, PBJ, hingga penggunaan MCP yang belum optimal. 3. Lemahnya Fungsi Pengawasan dan Pencegahan: Peran APIP sebagai garda terdepan pengawasan internal belum maksimal, ditambah dengan penegakan sanksi yang kurang dan budaya lapor yang rendah. 4. Buruknya Manajemen Aset Daerah: Aset tidak tercatat, mudah hilang atau disalahgunakan, dan terjadi pemborosan dalam pengadaannya. 5. Kebutuhan Mendesak akan Peningkatan Kapasitas dan Perubahan Budaya Organisasi: Pelatihan yang kurang dan budaya yang permisif menjadi penghambat perbaikan.

	6. Dampak Negatif yang Terukur: Rendahnya skor IPK dan SPI menjadi cerminan dari berbagai masalah di atas. Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa masalah korupsi di Papua bersifat multifaset, melibatkan aspek individu (integritas, mindset), sistem (tata kelola, pengawasan, pengelolaan aset), dan budaya organisasi. Solusi yang komprehensif perlu menyentuh semua aspek ini, tidak hanya fokus pada satu sisi saja. Misalnya, memperbaiki sistem saja tidak akan cukup jika integritas individu dan budaya organisasi tidak dibenahi, dan sebaliknya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Perlu pertemuan dengan : 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi untuk mendorong kedisiplinan dalam hal pencatatan dan pengontrolan aset daerah ; dan 2) Inspektorat Provinsi dan instansi terkait lainnya untuk mendorong penerapan MCP sebagai salah satu indikator sistem tata kelola keuangan.
Dokumentasi	

30) Kegiatan 30

Nama Kegiatan	Giat Wawancara bersama Penulis Buku "Politik Identitas & Dinamika Pemerintahan di Prov PBD" (Bapak Bernard K.)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	23 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan wawancara dari Bapak Bernard K. selaku Penulis Buku
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD; Bapak Bernard K
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	1. Kegiatan berjalan dengan baik 2. Masih banyak kalangan di Papua, bahkan hingga peneliti/kaum terdidik, yang juga belum memahami bahwa Papua telah dikembangkan dalam pola pikir baru, dimana tidak lagi sama seperti dulu. Hal ini termasuk kerangka penyelesaian berbagai dinamika sosial dan politik identitas di Wilayah Papua, bahkan telah ada PP 106 yang diturunkand dalam RIPP (dan RAPP) yang juga telah dijabarkan dalam Pepres No 12 Tahun 2025. 3. Dari diskusi berisi pertanyaan penulis terkait tatakeola pemerintahan yang diterapkan di era Otonomi Khusus terkait politik identitas. Pada pertanyaan- pertanyaan yang diajukan, nampak bahwa penulis tiak memahami aturan - aturan terbaru, misalnya terkait RIPP dan RAPP dan atau PP 106 Tahun 2021 dan PP 107 Tahun 2021 dan Pepres Nomor 12 Tahun 2025, yang telah memberikan ruang kepada lembaga adat untuk dibiayai dan terlibat dalam proses pembangunan. 4. Politik identitas dengan isu sara itu beda tipis saja.Politik identitas bisa jadi kekuatan sekaligus masalah.Politik identitas di Papua Barat Daya sudah banyak menyebabkan polarisasi Masyarakat.Dalam kebijakan pengisian jabatan di provinsi PBD, kepala daerah harus menempatkan orang yang mengisi jabatan adalah profesional dan representatif dari daerah serta mampu mengambil dua peran sekaligus, sebagai birokrat dan tokoh masyarakat.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. Perlu ada sosialisasi keberadaan BP3OKP ke dunia kampus (baca : road show) dan berbagai kebijakan baru terkait Papua dalam wujud RIPPP dan RAPPP dunia akademisi. 2. Perlu ada sosialisasi terkait RIPPP dan RAPPP sebagai paradigma baru pembangunan di Papua pada dunia kampus/intelektual dan lembaga adat. 3. Buku ini baik tuk merekomendasikan kepada pemerintah terkait penempatan jabatan.
Dokumentasi	

31) Kegiatan 31

Nama Kegiatan	Audiensi bersama Panitia Dies Natalis Universitas Victory
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	23 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan audiensi dari Panitia Dies Natalis Univ Victory
Peserta Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD; Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD; Panitia Dies Natalis Univ Victory
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP
Hasil Kegiatan	1. Panitia Dies Natalis memberikan proposal bantuan dana untuk acara dies natalis 2. Dosen yang mengajar di Universitas Victory rata-rata adalah karena pengabdian, mengingat kesejahterannya minim walaupun banyak yang punya titel tinggi. Mohon BP3OKP membantu mengkordinasikan dengan Pemda dan Pempus agar program sekolah gratis juga

	menyasar ke perguruan tinggi dan khusus perguruan tinggi swasta. Rata-rata penghasilan dosen berasal dari pembaruan biaya semester mahasiswa. Mahasiswa victory mayoritas OAP. Mereka awal masuk memang banyak, ketika sudah semester atas banyak yang undur diri bahkan DO karena tidak punya biaya untuk kuliah lagi. Perlu perhatian dari pemerintah. 3. BP3OKP akan hadir pada acara dies natalis dan akan melakukan kuliah umum (sosialisasi) tentang Lembaganya serta tata Kelola dana TKD di kampus victory pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Anggota BP3OKP PBD dan Pokja akan memberikan sumbangan sukarela untuk kegiatan Dies Natalis Univ Victory 2. BP3OKP perlu mensosialisaikan kelembagaan di Perguruan Tinggi/Kampus (Program : BP3OKP goes to Campus).
Dokumentasi	

32) Kegiatan 32

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Program Prioritas Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 serta Diskusi Kelompok Terumpun Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Tahun 2025 Region 2
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	26-28 Mei 2025 di Vega Prime Hotel & Convention Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan; Rakor ini menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan pada setiap awal tahun,

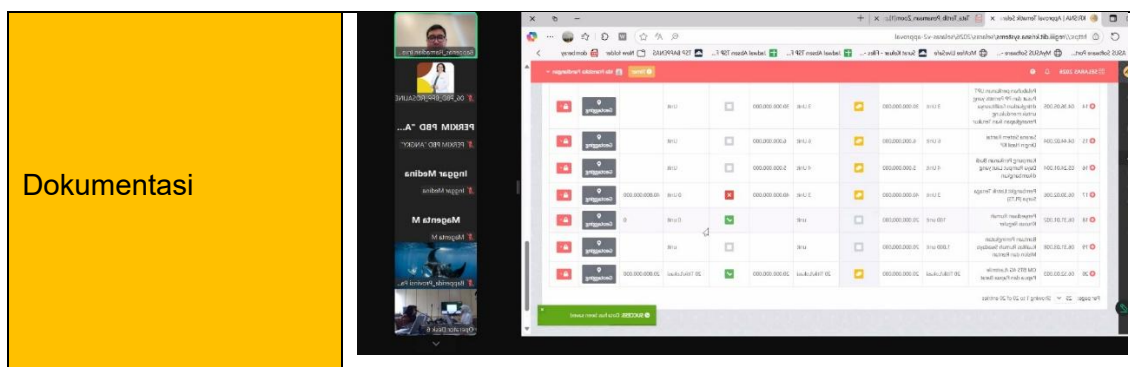
	dengan tujuan untuk mensosialisasikan rencana kerja tahunan dari Kementrian, ajang apresiasi bagi OPD teknis tiap kab/kota maupun provinsi. Pada Giat Rakor ini juga bertujuan untuk membangun komitmen bersama Pemda dalam menjamin peningkatan mutu SPM dibidang pendidikan pada tiap daerahnya
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Cerdas); BPMP PB; Dinas Pendidikan Se-PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	Hasil yang dicapai dari giat ini adalah : 1. Medapatkan Informasi mengenai program nasional Kemendikdasmen RI yang wajib dilaksanakan di Papua Barat Daya tetapi juga di Indonesia, 2. Melakukan Sinkronisasi Program nasional dimaksud dengan Kerangka RIPPP. Bahwa keduanya telah bersinergi, dan dengan demikian haruslah Renstra OPD dapat disusun berbasis RIPPP.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Beberapa langkah konkret perlu dilakukan untuk mendorong meningkatkan SPM Pendidikan; 1. Melakukan MoU bersama antara BP3OKP dan BPMP. 1. Mendorong Pendirian BPMP perwakilan Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

33) Kegiatan 33

Nama Kegiatan	Desk Tematik Kewilayahan Musrenbangnas Tahun 2025
---------------	---

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	28 Mei 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya (Zoom Meetings)
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan; Melakukan fungsi SHEK : evaluasi terhadap sinkronisasi perencanaan program dari daerah hingga ke pusat; Melakukan pengawasan terhadap perencanaan yang dilakukan oleh OPD di daerah hingga kesesuaian perencanaan pada kementerian/lembaga
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP PBD (Sehat, Cerdas, Produktif); Bappenas; Bapperida/Bappeda Se-PBD;
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Dari 17 usulan yang diajukan kepada pemerintah pusat, 6 diantaranya tidak direkomendasikan karena masalah prioritas penganggaran oleh K/L mengikuti direktif presiden. 3 program tidak direkomendasikan karena ternyata telah terakomodir dalam transfer ke daerah Dana Alokasi Khusus Non Fisik, 1 program tidak direkomendasikan karena kurangnya Readiness Criteria (RC) berupa DED (Detail Engineering Design). Sehingga hanya sekitar 7 kegiatan yang direkomendasikan. 2. Provinsi Papua Barat Daya memiliki usulan prioritas pembangunan sebagai kebutuhan strategis wilayah, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas dan membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Fokus pembangunan provinsi Papua barat daya yang perlu disinkronisasikan antara lain : • Pembangunan Infrastruktur Dasar: Meningkatkan konektivitas dan membuka akses ke daerah-daerah terpencil. • Peningkatan Akses Pelayanan Publik Dasar: Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan akses pelayanan publik dasar .

	• Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. • Penguatan Ekonomi Lokal: Mendukung program-program unggulan seperti Prodikter, Berdaya Ekomas, Paitua, dan Jambu Hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Acuan dalam penyelarasan dan kolaborasi rencana pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya adalah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023) dan RPJMN 2025–2029 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, dan dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Musrenbang -- saat melakukan desk hendaknya luaran dari Musrenbang adalah usulan secara lengkap hingga kepada kriteria yang wajib dipersiapkan. 2. Bappeda/Bapperida/Bapperlibang -- OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan hendaknya melakukan fasilitasi secara paripurna sehingga saat pembahasan tingkat Nasional berperan sebagai tim yang sama dengan OPD pengusung, bukan malah menjadi penggagal terhadap usulan yang dilayangkan OPD. 3. Program atau kegiatan yang diusulkan melibatkan APIP sehingga review dapat menjadi rekomendasi apakah suatu pengusulan program layak dilanjutkan atau direkomendasikan maupun tidak direkomendasikan. 4. BP3OKP sebagai badan pengarah percepatan pembangunan di Papua perlu mengawal Hasil Desk Tematik Kewilayahan Musrenbangnas Tahun 2025 dan selanjutnya diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Papua Barat Daya.



34) Kegiatan 34

Nama Kegiatan	Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025-2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	28 Mei 2025 di Hotel Rylich Panorama Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan; Melaksanakan fungsi SHEK : sinkronisasi dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah; Melaksanakan tugas pengawasan terhadap perencanaan program yang dilakukan pada tataran kebijakan makro
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja BP3OKP (Sehat, Cerdas, Produktif); Usulan/Calon Anggota Pokja BP3OKP PBD; Gubernur PBD; Bapperida/Bappeda Se-PBD; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Misi BP3OKP dan Misi RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Pokja Papua Sehat 1. Beberapa usulan oleh peserta konsultasi Publik terkait substansi dari Renwal RPJMD. 2. Pertemuan ini bertujuan menampung seluruh usulan untuk melengkapi dan menyempurnakan RPJMD nantinya.

	Pokja Papua Cerdas Kesimpulan sementara dari hasil presentasi adalah, Acuan RPJMN (Perpres 12 tahun 2025) belum disinkronisasikan secara detail menuurut misi dan program strategi prioritas antar kab/kota. Pokja Papua Produktif 1. Mengingat terbatasnya waktu, kegiatan - Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 diperpanjang waktunya hingga tgl 29 Mei 2025. Hal ini dilakukan mengingat kurangnya partisipasi OPD terkait untuk mendukung penyusunan dokumen RPJMD Papua Barat Daya, terutama terkait indicator dan program. 2. Pada Pemaparan Kemendagri dan Bappenas/BPPN mengarahkan bahwa pembangunan di Papua harus dilaksanakan dengan merujuk kepada kerangka program yang buat di Pemerintah Pusat Jakarta oleh Presiden dan Keppres 12 Tahun 2025 Lampiran IV. Pada bahan paparan Perwakilan BAPPENAS/BPPN, ada indikasi belanja di luar aturan, yakni Belanja pegawai sebesar 41,21% dan Belanja Pendidikan di bawah 20%.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Pokja Papua Sehat 1. Rencana Pembangunan berpijak pada visi dan misi kepala daerah yang diselaraskan dengan RIPP, sehingga penyusunannya wajib mengacu pada beberapa dokumen yang sinergitasnya menghasilkan arah kebijakan yang jelas. 2. Penyusunan indikator hendaknya menjadi jawaban atas keinginan dari visi maupun misi kepala daerah, sehingga sebaiknya ditetapkan indikator yang tidak bersifat general dan terkesan asal-asalan. 3. Renwal belum mencerminkan arah kebijakan secara tegas sehingga hendaknya dilakukan analisa yang lebih

valid serta penetapan indikator yang mengakomodir tercapainya visi dan misi kepala daerah.

Pokja Papua Cerdas

Perlu dikonfirmasi File Ranwal RPJMD PBD untuk direview oleh BP3OKP Papua Barat Daya.

Pokja Papua Produktif

1. BP3OKP akan terus melaksanakan kordinasi Bersama pihak Beperida Papua Barat Daya untuk mengawal proses percepatan penyelesaian dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat bersesuaian Regulasi dan Hirarki Perencanaan, secara sturktur dokumen harus lengkap, memiliki parameter capaian pembangunan yang jelas/dapat diukur dan konsisten, berbasis dan merupakan bagian dari partipisasi aktif dari semua pihak.
2. Tatap mengawal proses penyusunan RPJDM Provinsi Papua Barat Daya 2025-2029 agar dilakukan sesuai dengan rambu-rambu perundangan, sehingga tidak ada belanja pegawai yang melebihi 30% dan belanja Pendidikan yang kurang dari 20% pada postur keuangan daerah pada tahun berjalan ke depan.

Dokumentasi



2.2 Capaian

Pada bulan Mei 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya mencatat sejumlah capaian kinerja strategis melalui pelaksanaan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi), khususnya dalam penguatan perencanaan daerah, koordinasi strategis sesuai misi percepatan pembangunan, serta pengawasan dan harmonisasi lintas sektor.

Beberapa capaian BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Mei 2025 antara lain :

1. Koordinasi Strategis Program Percepatan
 - a. Melaksanakan pendampingan terhadap Dinas Pendidikan dan Pemda Kabupaten Tambrau terkait program percepatan misi Papua Cerdas Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), Sekolah Berpola Asrama maupun Sekolah Terbuka.
 - b. Penguatan dukungan terhadap program pendidikan afirmatif di Kabupaten Sorong Selatan dan penyusunan model tetap program SSH.
 - c. Sinkronisasi program melalui kehadiran dalam upacara hardiknas di Kabupaten Tambrau, Musrenbang Otsus dan RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026.
 - d. Terlibat dalam Rakerkesda Kabupaten Tambrau untuk sinkronisasi program kesehatan dengan RIPPP.
 - e. Mengawal pembangunan RSUD Raja Ampat melalui kegiatan *groundbreaking*, serta kunjungan lapangan ke RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan.
 - f. Mendorong pembentukan pelayanan kesehatan berjalan (*Mobile Health Service*) sesuai program percepatan misi Papua Sehat dalam RIPPP.
 - g. Inisiasi program peningkatan pariwisata melalui transportasi udara dan pengembangan Bandara DEO Sorong (rencana rute baru Labuan Bajo-Sorong).
2. Penguatan Perencanaan Daerah
 - a. Terlibat, memberikan review serta masukan terhadap forum strategis perencanaan musrenbang otsus dan RKPD PBD Tahun 2026 serta konsultasi public terkait dokumen RPJMD Kabupaten Tambrau dan Provinsi Papua Barat Daya.
 - b. Mendorong integrasi indikator RIPPP dan program unggulan Presiden dalam RPJMD Daerah.
 - c. Terlibat dalam kegiatan SKALA di Makassar dan penyusunan rencana aksi SPM untuk wilayah Papua.
 - d. Mendorong integrasi sistem informasi daerah dan satu data.

3. Pengawasan dan Harmonisasi Lintas Sektor

- a. Melakukan koordinasi lintas lembaga dengan Kementerian PU (Dirjen Bina Marga), BPKP PBD, Pangdam Jaya dan Kemenhan guna pembangunan sinergitas serta untuk mendukung realisasi percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, realisasi infrastruktur, penguatan pengawasan dan sinergi lintas sektor.

Rekomendasi umum berdasarkan capaian antara lain :

1. Penguatan literasi regulasi di kalangan OPD daerah agar selaras dengan RIPPP dan program nasional.
2. Optimalisasi koordinasi antar-OPD untuk menghindari tumpang tindih dan memperkuat efektivitas perencanaan.
3. Evaluasi pelaksanaan Musrenbang agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan ini disusun dan disampaikan, sebagai laporan realisasi sekaligus pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP dengan periode waktu bulanan yakni bulan Mei tahun 2025.

Diharapkan laporan ini dapat membawa manfaat bagi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja ke depannya, serta bermanfaat bagi Wakil Presiden RI selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP) dan Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dalam monitoring kegiatan BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.